



DISNAKER
KABUPATEN BOGOR

RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026 dan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 secara umum memedomani ketentuan Peraturan Nomor 23 Tahun 2023 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bogor. Sebagai dokumen rencana tahunan, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah merancang Rencana Kerja sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2026. sesuai dengan tugas utama, fungsi, dan wewenang yang dimiliki.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa mendatang sangat diharapkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga Buku Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat terselesaikan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

Akhirnya, Semoga Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor di masa mendatang.

Bogor, 07 Agustus 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor



Drs. Nana Mulyana, M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 197205031992031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II EVALUASI HASIL RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024	II-1
2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	II-20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-21
2.5 Penelaahan Usuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	II-43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-8
3.3 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	III-10
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ...	IV-1
BAB V Penutup.....	V-1



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 7 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

AJAT ROCHMAT JANNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 24 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 AGUSTUS 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang berlaku selama satu tahun. Dokumen ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan tahunan di Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain itu Renja Dinas Tenaga Kerja 2026 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk tahun kedua dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor untuk periode 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja untuk tahun 2025-2029.

Tahun 2026 akan menjadi tahun kedua dalam rencana jangka menengah antara 2025-2029. Tahun ini membawa visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Kerja untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2026 adalah bagian penting dari isi RPJMD Kabupaten Bogor untuk periode 2025-2029. Meskipun saat itu RPJMD masih dalam tahap

penyusunan, isi dari Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja sudah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan sesuai dengan RPJMD 2025-2029. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan perangkat daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3). Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, "Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah", yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 menyesuaikan dengan kondisi permasalahan daerah yang dihadapi saat ini. Secara vertikal rencana Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 telah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Nasional

Tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Tahun 2026 memuat Kebijakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai bentuk implementasi penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 dan mendukung Indikator Kinerja Utama yaitu: 1). Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja, 2). Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing 3). Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat, dan 4). Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah. Secara umum tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah 2026 dapat direncanakan sesuai jadwal sebagai berikut :

No	Uraian Renja PD Tahun 2026	Bulan/Tahun	Keterangan	
1	Persiapan penyusunan Renja PD	18-26 Nov 2024		
	Pembentukan Tim Penyusun Renja PD (difasilitasi Bappedalitbang)	19 Nov 2024		
	Orientasi Renja PD	18-29 Nov 2024		
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	2 Des 2024 - 21 Feb 2025		
	Input Ranwal Renja PD dalam SIPD	2 Jan- 21 Feb 2025		
	Verifikasi usulan musrenbang kecamatan	3-20 Feb 2025		
	Verifikasi pokir DPRD			
	Tahap I (s/d PD)	2 Jan - 4 Mar 2025		
	Tahap II (s/d PD)	20 Feb - 4 Mar 2025		
	Verifikasi hibah	30 Jan - 4 Mar 2025		
	Verifikasi bantuan sosial	30 Jan - 4 Mar 2025		
	3	Penyusunan Rancangan Renja PD	24 Feb - 5 Mar 2025	
		Input Rancangan Renja PD dalam SIPD	24 Feb - 5 Mar 2025	
Pra Forum PD untuk PD strategis		17-21 Feb 2025		
Forum Gabungan PD)		24-28 Feb 2025		
4	Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD	12 Mar-28 Juli 2025		
	Input Rancangan Akhir Renja PD dalam SIPD	12 Mar-18 Juli 2025		
	Penyempurnaan Renja PD pasca Forum PD	3-5 Mar 2025		
	Verifikasi Ranhir Renja PD	1-4 Jul 2025		
	Reviu APIP Renja PD	7-18 Jul 2025		
	Proses Raperbup	1-25 Jul 2025		
	5	Penetapan Renja PD	30 Juli 2025	

Renja Dinas Tenaga Kerja terkait dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan tujuan daerah "Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas" dan sasaran "meningkatnya aksesibilitas ekonomi masyarakat" melalui tujuan dan sasaran RKPD, Dinas Tenaga telah menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta targetnya pada rencana kerja tahun 2026 yaitu :

- 1) Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja dengan indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota, dengan target yang ditetapkan sebesar 24,33 %.
- 2) Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan target yang ditetapkan sebesar 1,12 %.
- 3) Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat dengan indikator Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti, dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.
- 4) Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target yang ditetapkan sebesar 87,42%.

Keterkaitan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, sesuai dengan prioritas kesatu yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, dengan program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yaitu program penempatan tenaga kerja dengan Tolak Ukur Terpenuhinya pencari kerja terdaftar yang bekerja indikator Persentase pencari kerja terdaftar yang bekerja, mampu menjawab solusi penempatan tenaga kerja melalui layanan kerja dalam dan luar negeri melalui layanan penempatan tenaga kerja daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi Pasar Kerja Online, kegiatan penempatan dan pemagangan, PKB dan PKWT atau melalui fasilitasi pengiriman transmigrasi antar daerah dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri melalui perusahaan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3458);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja Kelas A Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kabupaten Bogor Kerja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah:

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.



2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026;
3. Menjadi panduan bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, fungsi Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, keterkaitan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan RPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Tenaga Kerja, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan



Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2025

- 2.1. Capaian kinerja perangkat daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2024

2.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas BPS Tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,34 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebesar 8,45 %, bila dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar 8,47%, mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1.13 %, ini merupakan angka penurunan yang cukup signifikan mengingat kondisi saat ini masih banyak pekerja yang di PHK dari perusahaan dan jumlah pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan.

Capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 merupakan Tahun awal Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu 1 (satu) Indikator tujuan "Menurunnya Angka Pengangguran dengan indikator Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)" dan 2 (dua) Indikator sasaran : "Meningkatnya Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dengan indikator Presentase angkatan kerja yang bekerja / Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)" dan "Terfasilitasinya kebijakan Transmigrasi Pemerintah Pusat dengan indikator kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindak lanjuti". Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 dengan target 8,45 % realisasinya yaitu 7,34% dengan rumus indikator Jumlah Penganggur (210.186 orang) dibagi Jumlah Angkatan Kerja (2.861.902 orang) dikali 100% (Data BPS Agustus 2024), tingkat capaian 113,14%, dengan demikian Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja melampaui target yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja.
2. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah

kabupaten/kota, Tahun 2024 target 91,55% dengan realisasi 92,66%. Untuk mengukur tingkat kesempatan kerja diketahui menggunakan rumus yaitu indikator Jumlah Penduduk Bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja yang terdaftar (AK1) dikali 100% :

Diketahui menurut data Data BPS Agustus 2024

Jumlah Penduduk Bekerja = 2.651.716

Jumlah Angkatan Kerja = 2.861.902

$$\begin{aligned}\text{Tingkat Kesempatan Kerja} &= \frac{\text{Jumlah penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \\ &= \frac{2.651.716}{2.861.902} \times 100 = 92,66\%\end{aligned}$$

Menurut hasil data diatas memperlihatkan realisasi dari Dinas Tenaga Kerja yang diperoleh yaitu sebesar 92,66 %. Artinya Tingkat capaian yang didapatkan sebesar 101,21%, dengan demikian Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja melampaui target yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Tenaga Kerja.

3. Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti, Tahun 2024 target 100%, dengan rumus indikator Jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat (0 kebijakan) dibagi Jumlah kebijakan transmigrasi yang difasilitasi (0 kebijakan) dikali 100%, realisasi Tahun 2024 Kabupaten Bogor tidak memiliki kuota keberangkatan transmigran sehingga tidak ada kebijakan yang difasilitasi, karena targetnya 0% maka disamakan dengan capaian 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah "Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah Indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan", Indikator Kinerja Perangkat Daerah telah dituangkan dalam Rencana Strategis dalam bentuk Indikator Outcome



program. Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 6 (enam) program, yaitu 1 (satu) program penunjang dan 5 (lima) program utama.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)		
				REALISASI				TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN										
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%				100,00	100,00	100,00	
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%			-	100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			3,00	3,00	100,00
2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen			1,00	1,00	100,00

2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1,00	1,00	1,00	100,00	
2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1,00	1,00	1,00	100,00	
						Jumlah dan jenis dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun	Dokumen				1,00	1,00	1,00		
2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				1,00	1,00	1,00	100,00	
						Jumlah dan jenis dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan yang disusun	Dokumen				1,00	1,00	1,00		
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	
						Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yg disusun	Dokumen				1,00	1,00	1,00		
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	
						Jumlah tayangan publikasi media yang terselenggara	Tayang				8,00	10,00	10,00		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%						100,00	100,00	100,00

2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				1 (Dinas)	48,00	48,00	100,00
2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					3,00	3,00	100,00
2	07	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen							
2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen							
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen							
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1,00	1,00	100,00

2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								
2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					2,00	2,00	100,00
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2,00	2,00	100,00
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					1,00	1,00	100,00

2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					18,00	18,00	100,00
2	07	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan								
2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1,00	1,00	100,00
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3,00	3,00	100,00
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					1,00	1,00	100,00

2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1,00	1,00	100,00
						Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	Unit					18,00	18,00	100,00
						Jumlah petugas keamanan kantor	Orang					11,00	11,00	100,00
						Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang					10,00	10,00	100,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%					100,00	100,00	100,00
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					5,00	5,00	100,00
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					26,00	26,00	100,00
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						110,00	110,00	100,00
2	07	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara								
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					3,00	3,00	100,00

2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi						63,00	63,00	100,00
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4,00	4,00	100,00
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%					12,45	76,92	617,86
2	07	02	2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Dokumen					1,00	0	0,00
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Dokumen					0	0	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	%	72,64				97,83	84,08	93,71
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%					66,06	67,05	
2	07	03	2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	86,25				100,00	100,00	100,00
						Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%					1,74	1,74	
						Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%					100,00	100,00	

2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	210,00	140,00	###	320,00	320,00	100,00
						Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi	Orang			0,00	260,00	260,00	
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga				1,00	1,00	100,00
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi LSP	Orang			50,00	30,00	30,00	100,00
						Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang				100,00	100,00	100,00
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja							
2	07	03	2.02		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Persentase LPK yang terakreditasi	Ruang				15,33	11,61	98,83
						Persentase LPK yang memiliki perizinan					82,00	100,00	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga			20,00	150,00	148,00	99,33
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LLS	Orang			0,00	40,00	40,00	

2	07	03	2.04		KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%					7,89	7,80	98,88
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan		40,00			8,00	8,00	100,00
						Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Peningkatan Produktivitas	Orang		80,00			40,00	40,00	
2	07	03	2.05		PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Data tingkat produktivitas total	%					66,08	67,05	101,47
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen		0,00			1,00	1,00	100,00
						Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengukuran produktivitas	Orang		0,00			30,00	30,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	11,66				22,96	29,35	127,82
2	07	04	2.01		PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Perjanjian					1,00	1,00	100,00
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Orang					600,00	600,00	100,00
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		0,00			160,00	160,00	100,00

					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang			2 (Kelompok)	80,00	80,00	
					Jumlah peserta pelatihan manajemen pengembangan usaha	Orang			0,00	1,00	1,00	
2	07	04	2.02		PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga			2,00	1,00	50,00
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga		1,00	1,00	1,00	100,00
					Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan LPTKS dan BKK	Orang				25,00	25,00	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan			2500,00	2785,00	51,98
					Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang				3500,00	1559,00	
					Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK				100,00	0,00	
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen		1,00	1,00	1,00	100,00
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang			#####	17299,00	37,91

						Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang					2,00	2,00	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang					500,00	500,00	100,00
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang					70,00	70,00	100,00
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang					30,00	30,00	100,00
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan di Kabupaten Bogor						0,00	0,00	
2	07	04	2.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang melakukan perpanjangan IMTA						0,00	0,00	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%					26,58	42,65	160,58

2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%					7,27	8,65	70,76
						Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%					1,63	0,67	
						Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%					7,58	9,32	
						Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%					70,31	0,00	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan					116,00	116,00	100,00
						Jumlah Dokumen PP, PKB dan PKWT yang dimonitoring	Dokumen			1,00	1,00	1,00		
						Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perusahaan	Orang			50,00	150,00	150,00		
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan					1,00	1,00	100,00
						Jumlah rekomendasi besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati untuk di ajukan penetapannya oleh Gubernur Jawa Barat	Dokumen			1,00	1,00	1,00		

2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%					10,96	1,61	295,93
						Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	SP/SB					340,00	364,00	
						Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS					1,00	1,00	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara			####		40,00	33,00	91,25
						Jumlah pelaksanaan Hari Buruh Nasional	Kegiatan					1,00	1,00	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara			20,00		40,00	33,00	82,50

2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja					340,00	364,00	102,35
						Jumlah dokumen verifikasi data SP/ SB dan DPC di Kabupaten Bogor	Dokumen			1,00	1,00	1,00	100,00	
						Jumlah Pekerja Teladan Terpilih	Orang				3,00	0,00	0,00	
						Jumlah DPC yang mendapatkan dana hibah	DPC				8,00	8,00	100,00	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga					1,00	1,00	100,00
						Jumlah peserta yang mengikuti Edukasi LKS Bipartit	Orang				200,00	200,00		
						Jumlah rekomendasi Kerja Sama Tripartit Daerah yang tersusun	Rekomendasi			1,00	2,00	2,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%			###	0,00	0,00		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	KK					0,00	0,00	
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga					0,00	0,00	

3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga					150,00	150,00	100,00
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi					0,00		
3	32	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi			15,00		0,00		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 yang menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja hingga tahun 2024 berikut ini:

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Hingga Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
1	Tujuan : Menurunnya Angka Pengangguran								
	Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen (%)	14,29	12,22	10,64	8,47	8,45	7,34	113,14
2	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja								
	Presentase angkatan kerja yang bekerja / Tingkat. Kesempatan Kerja (TKK)	persen (%)	85,71	87,78	89,36	91,53	91,55	92,66	101,21
	Terfasilitasinya kebijakan transmigrasi Pemerintah Pusat	persen (%)	100	100	100	100	100	100	100

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor :

- 1). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - Banyak tenaga outsourcing tidak diperbolehkan lagi oleh aturan baru Pemerintah Pusat, sehingga daerah kekurangan tenaga kerja. ASN di Kabupaten Bogor relatif sedikit dibandingkan populasi dan angkatan kerja yang besar.
 - Struktur kepegawaian belum optimal untuk memenuhi beban kerja di semua bidang Disnaker, khususnya Bidang Pelatihan, Penempatan, dan Syarat Kerja.
- 2). Kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar
 - Banyak lulusan SMK maupun perguruan tinggi belum memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, menyebabkan kesenjangan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Melalui BLK, Disnaker menyiapkan pelatihan bagi sekitar 500 orang per tahun, namun kuota masih terbatas.
 - Informasi pasar kerja juga kurang terhubung dengan pencari kerja; hal ini diperbaiki melalui aplikasi seperti Bogor Carrier Center untuk menyalurkan dan memantau proses penempatan pekerjaan.
- 3). Tingginya angka pengangguran dan tantangan penyerapan tenaga kerja
 - Pertumbuhan angkatan kerja melebihi tumbuhnya lapangan kerja. Berkurangnya lowongan serta persaingan dari luar daerah memperburuk kondisi ini. Job fair diselenggarakan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi masih perlu ditingkatkan skalanya dan kualitasnya.
- 4). Infrastruktur ketenagakerjaan dan akses layanan masih terbatas
 - Layanan informasi dan pelatihan masih terpusat, dengan keterbatasan kuota peserta. Perlu perluasan fasilitas dan infrastruktur BLK, termasuk di wilayah Bogor Timur, agar lebih banyak orang dapat mengakses pelatihan ketenagakerjaan secara inklusif.
 - Sistem digital (website/aplikasi) yang baru dipakai masih menghadapi tantangan adopsi staf Disnaker dari sisi kapabilitas dan penggunaan teknologi.
- 5). Tantangan pengelolaan administrasi dan tata kelola internal



- Dalam berbagai unit, beberapa SOP dan prosedur kerja belum lengkap atau tidak diikuti secara konsisten, yang berdampak pada efektivitas kinerja dan akuntabilitas Lembaga.
 - Perlu penerapan manajemen kinerja berbasis kompetensi dan sistem merit untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja pegawai. Belum semua indikator kinerja, reward/sanksi, dan remunerasi dijalankan secara efektif.
- 6). Kebijakan penempatan kerja, pengupahan, dan hubungan industrial
- Pengelolaan aspek syarat kerja (seperti struktur dan skala upah, PKB/PKWT, jaminan sosial) serta penyelesaian perselisihan dan pembinaan organisasi pekerja menjadi fokus tugas Bidang Syarat Kerja. Tantangan terjadi jika informasi dan regulasi tidak tersampaikan dengan baik kepada pengusaha dan buruh.
 - Pengawasan terhadap LPTKS dan BKK/LPK sebagai penyalur tenaga kerja perlu terus diperkuat agar layanan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan penyiaran ketenagakerjaan yang tidak terkendali.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal renja Dinas Tenaga Kerja

Rancangan awal Renja atau Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dituangkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Tenaga Kerja

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	11.444.180.923,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100,00	15.593.323.813,00	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	567.136.800,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100,00	567.136.800,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	117.823.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	117.823.500,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	15.519.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	15.519.700,00	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	14.133.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	14.133.700,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	53.030.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	53.030.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	26.381.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	26.381.900,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	35.096.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	35.096.000,00

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	270.356.300,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	270.356.300,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Tahapan Pengelolaan data, integritas data			34.794.800,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Tahapan Pengelolaan data, integritas data			34.794.800,00
2	Administrasi Keuangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	7.815.779.326,00	Administrasi Keuangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	11.589.922.216,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54,00	7.600.820.210,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54,00	11.374.983.100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3,00	94.250.516,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3,00	94.250.516,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	17.065.300,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	17.065.300,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	12.809.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	12.809.400,00
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	10.086.800,00	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	10.086.800,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	69.889.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	69.889.400,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	10.857.700,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	10.857.700,00

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	7.784.200,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	7.784.200,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	7.784.200,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	7.784.200,00
4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawalan	%	100,00	314.129.540,00	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawalan	%	100,00	314.129.540,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1,00		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	1,00	314.129.540,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Dokumen	1,00	314.129.540,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	456.686.657,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	100,00	456.686.657,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	16.083.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	16.083.300,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	47.911.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	47.911.200,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	58.134.400,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	58.134.400,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	2.205.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	2.205.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	45.651.400,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	45.651.400,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	276.276.857,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	276.276.857,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	10.424.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	10.424.500,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100,00	249.809.700,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor - Cibinong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	100,00	249.809.700,00

			Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			35.000.000,00		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			35.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25,00	214.809.700,00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25,00	214.809.700,00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.453.249.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.453.249.400,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor - Cibinong		Laporan	1,00	578.003.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bogor - Cibinong		Laporan	1,00	578.003.500,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong		Laporan	1,00	875.245.900,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bogor - Cibinong		Laporan	1,00	875.245.900,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100,00	579.605.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			%	100,00	954.605.300,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	111.121.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	111.121.500,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	146.475.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26,00	146.475.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125,00	75.390.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125,00	75.390.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	390.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	231.618.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	231.618.800,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	
Kegiatan Utama												
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					1.224.451.800,00	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					2.424.451.800,00
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00	775.618.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00	1.975.618.000,00
			Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	1,85				Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	1,85	
			Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100,00				Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100,00	



	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n,	Orang	540,00	600.000.000,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n,	Orang	540,00	1.800.000.000,00
			Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi	Orang	525,00				Jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi	Orang	525,00	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun,	Lembaga	1,00	175.618.000,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun,	Lembaga	1,00	175.618.000,00
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi LSP	Dokumen	1,00				Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi LSP	Dokumen	1,00	
			Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	40,00				Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Orang	40,00	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2,00		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2,00	

2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang terakreditasi	%	18,86	144.048.700,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	%	18,86	144.048.700,00	
			Persentase LPK yang memiliki perizinan					Persentase LPK yang memiliki perizinan				
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			144.048.700,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		144.048.700,00	
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LLS						Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LLS			
3	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			%	85,14		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		%	85,14		
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong		Perizinan	2,00		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Perizinan	2,00		
4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			%	8,71	158.098.900,00	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		%	8,71	158.098.900,00	
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12,00	158.098.900,00	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12,00	158.098.900,00

5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Data tingkat produktivitas total	%	68,35	146.686.200,00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data tingkat produktivitas total	%	68,35	146.686.200,00		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1,00	146.686.200,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1,00	146.686.200,00	
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengukuran produktivitas	Orang	40,00				Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengukuran produktivitas	Orang	40,00		
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja			%	14,11	125.000.000,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja			%	14,11	125.000.000,00	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Dokumen	1,00	125.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Dokumen	1,00	125.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1,00	125.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1,00	125.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan			

4	Program Penempatan Tenaga Kerja			%	25,59	1.329.986.632,00	Program Penempatan Tenaga Kerja			%	25,59	1.979.986.632,00
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			Perjanjian	1,00	641.652.750,00	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			Perjanjian	1,00	1.441.652.750,00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			113.685.700,00	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.			113.685.700,00
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	80,00	225.753.500,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	80,00	225.753.500,00
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Bogor - Cibinong				100.636.200,00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Bogor - Cibinong				100.636.200,00
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	360,00	401.577.350,00	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	360,00	1.001.577.350,00
2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			LPTKS	2,00		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			LPTKS	2,00	
			Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota						Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			

	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabikota	Lembaga	2,00		Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabikota	Lembaga	2,00		
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2,00		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2,00		
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan LPTKS dan BKK						Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan LPTKS dan BKK				
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	2.700,00	396.996.482,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	2.700,00	446.996.482,00	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1,00	121.285.182,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1,00	121.285.182,00	

	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	22.500,00	126.692.500,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	22.500,00	126.692.500,00
	Job Fair /Bursa Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	700,00	149.020.800,00	Job Fair /Bursa Kerja	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	700,00	149.020.800,00
4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	70,00	91.335.400,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	70,00	91.335.400,00
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40,00	91.335.400,00	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40,00	91.335.400,00
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kabupaten Bogor - Cibinong					Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kabupaten Bogor - Cibinong				
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Bogor - Cibinong					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Bogor - Cibinong				

5	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan di Kabupaten Bogor	Orang	252,00		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan di Kabupaten Bogor	Orang	252,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang melakukan perpanjangan IMTA	Orang	252,00		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang melakukan perpanjangan IMTA	Orang	252,00		
5	Program Hubungan Industrial		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Katanagakerjaan)	%	29,81	2.515.330.400,00	Program Hubungan Industrial		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	29,81	2.515.330.400,00	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	7,39	518.426.300,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	7,39	518.426.300,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan	Perusahaan	118,00	130.423.300,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	118,00	130.423.300,00	

			Terdaftar di WPKP Online										
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	28,00	128.120.600,00	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	28,00	128.120.600,00	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1,00	259.882.400,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1,00	259.882.400,00	
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	10,34	1.996.904.100,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	10,34	1.996.904.100,00	

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		350.555.800,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		350.555.800,00
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	44,00	299.512.700,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	44,00	299.512.700,00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	350,00	1.106.239.700,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	350,00	1.106.239.700,00



	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1,00	240.595.900,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1,00	240.595.900,00
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Bogor - Cibinong					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Bogor - Cibinong				
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Terselenggaranya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%	100,00	75.000.000,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Terselenggaranya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%	100,00	225.000.000,00
1	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	Kk	3,00	75.000.000,00	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	Kk	3,00	225.000.000,00
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kk	3,00		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kk	3,00	75.000.000,00
	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kk	20,00	75.000.000,00	Penyuluhan Transmigrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kk	20,00	75.000.000,00

	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	2,00		Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	2,00	75.000.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2,00		Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Kabupaten Bogor - Cibinong	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	2,00		



Pada tabel 2.3 diatas disandingkan antara usulan awal Pra RKA 2026 dengan hasil analisis kebutuhan setelah dianalisis lebih lanjut. Hasilnya ada beberapa program kegiatan yang pengurangan pagu anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk Program Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi dan Wirausaha baru yang menjadi concern Bupati terpilih, tahun 2026 direncanakan akan melakukan peningkatan/modernisasi peralatan pelatihan di Balai Latihan Kerja, serta menambahkan beberapa kegiatan baru di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja diantaranya yaitu: 1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja, 2) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, dan 3). Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan masyarakat

Usulan program/kegiatan/sub kegiatan pemangku kepentingan dituangkan pada tabel 2.4 sebagai berikut :



Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bogor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Kabupaten Bogor	Jumlah SDM / Petugas Antar Kerja yang tersedia	40	Orang	Usulan dari Bidang Pentasker dengan sumber dana APBD
2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan Ketenagakerjaan	20	Orang	Usulan dari Bidang Pentasker dengan sumber dana APBD
3	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.kota	Kabupaten Bogor	Jumlah Pembayaran DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang divalidasi	245	Dokumen	Usulan dari Bidang Pentasker dengan sumber dana APBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah kegiatan analisis mendalam untuk memahami hubungan antara kebijakan nasional dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Ini termasuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan nasional dapat diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja, serta memastikan menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional (asta cita).

Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor itu sendiri. Sebagaimana tersebut dalam RPJMD Kabupaten Bogor, Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029 yaitu dengan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Visi Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 adalah Lembur Diurus, Kota Ditata sedangkan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2025 – 2029 adalah Istimewa dan Gemilang.

Misi merupakan suatu pernyataan umum tentang tindakan yang akan diambil untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi tersebut, penting untuk memperhatikan keadaan, permasalahan yang ada, serta tantangan di masa depan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan peluang yang tersedia. Oleh karena itu, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
- 2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
- 3 Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- 4 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- 5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu misi yang berkaitan dengan Pelayanan Ketenagakerjaan adalah misi ke 5 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sinergi dan keterkaitan misi nasional (asta cita), Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, penjelasan yang terkandung di dalam rumusan misi kelima Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut serta keselarasannya dengan rumusan misi nasional dan Provinsi Jawa Barat yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, selaras dengan misi ketiga, keenam dan kedelapan Nasional, serta misi kedua dan ketiga Jawa Barat.

Misi Nasional (Asta Cita)	Misi Jawa Barat	Misi Kabupaten Bogor
<p>3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;</p> <p>6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;</p>	<p>2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;</p> <p>3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya</p>	<p>5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.</p>

8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		
--	--	--

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sasaran dari misi ini adalah Menurunnya kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu diperlukan pengembangan pelayanan ketenagakerjaan yang baik. Dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2030 pada misi ke 4 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dengan strategi pembangunan Sumber Daya Manusia, tercantum pada no urut 14-16 yaitu " Peningkatan produktivitas tenaga kerja, Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja dan Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi.

Adapun Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja mendapatkan pada visi/misi 5 yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sasarannya yaitu Menurunnya tingkat pengangguran terbuka . Jadi Dinas Tenaga Kerja Memiliki 2 Indikator dalam program prioritas ini.

Peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja sesuai pasar kerja Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan/pelatihan vokasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja selama tahun 2025-

2030. Peningkatan Perlindungan bagi tenaga kerja Prioritas ini dilakukan dalam bentuk peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan melihat prioritas pembangunan nasional di atas, Dinas Tenaga Kerja mendukung prioritas pembangunan nasional . Tolak ukur kinerjanya Meningkatnya cakupan tenaga kerja bersertifikat, dengan indikator persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan tingkat produktivitas tenaga kerja.

Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
	Disisi dengan asta cita yang didukung oleh PD sesuai hui	Disisi dengan nama program PD sesuai SIPD-Ri	disisi dengan sasaran kinerja program yang mendukung asta cita	disisi dengan indikator kinerja sasaran program	jelas	jelas	disisi dengan anggaran program yang mendukung asta cita program dimaksud
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	24,58	%	1.951.630.904
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,07	%	806.466.825

Begitupula dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, ada 7 (tujuh) prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat yaitu :

1. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah
2. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
5. Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata
6. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama

Dinas Tenaga Kerja mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat pada prioritas ke 1 "Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah" yang diimplementasikan dalam Program Penempatan tenaga kerja dengan Tolak Ukur kinerja Terpenuhinya pencari kerja terdaftar yang bekerja dan indikator kerjanya adalah Persentase pencari kerja terdaftar yang bekerja

Secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Pencari Kerja Yang Bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	24,56	%	1.951.830.904
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Tenaga Kerja yang kompeten	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,07	%	806.456.825

Ada 4 (empat) dukungan terhadap kebijakan Nasional yang akan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja :

1. Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing ditingkat nasional dan internasional, dengan Bidang pengampu Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan UPT BLK, yang fungsinya adalah :
 - Relationship untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka memperkuat kinerja BLK.
 - Pengembangan sistem integrasi pelatihan dan sertifikasi.
2. Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja, dengan Bidang pengampu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, yang fungsinya adalah :
 - Pengembangan sistem integrasi pelatihan dan penempatan.
 - Digitalisasi pelayanan pasar kerja.
 - Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholder.
3. Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan, dengan Bidang pengampu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, yang fungsinya adalah :
 - Penyusunan desain baru tenaga kerja mandiri
 - Pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri
4. Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan, dengan Bidang pengampu Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, yang fungsinya adalah :
 - Peningkatan harmonisasi hubungan dengan SP/SB yang lebih berkualitas
 - Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit.

Secara matrik dapat digambarkan dengan tabel 3.3 dibawah ini :



Tabel 3.3		
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional		
KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025	Tugas dan fungsi Disnaker mencakup upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan pekerja, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja tolak ukurnya adalah Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja dengan indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Sedangkan untuk sasaran dinas tenaga kerja memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Tolak ukurnya Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Tolak ukurnya Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat dengan indikatornya adalah Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindak lanjuti

Untuk rumus indikator dan target capaian Tahun 2026 dapat dilihat dari Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Tujuan :					
Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		25,59	%
Sasaran :					
Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		1,19	%
Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat		Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti		100,00	%



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program.

Sub Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun 2026 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026
3. Prioritas Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026. Pada tahun 2025 direncanakan ada 6 (Enam) program, 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 61 (Enam Puluh Satu) sub kegiatan.

Sasaran program/kegiatan 2026 mencakup Indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana / pagu indikatif disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5 disajikan sebagaimana terlampir



Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Sekretariat	1	8	40	19.627.947.200
Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	5	7	3.501.656.800
Bidang Perencanaan Tenaga Kerja	1	1	2	213.300.000
Bidang Penempatan Tenaga Kerja	1	5	13	2.003.449.700
Bidang Hubungan Industrial	1	2	8	2.820.451.000
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1	1	4	134.944.900

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka secara struktur program kegiatan mengalami perubahan, menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, bukan hanya kode kegiatannya saja yang berubah, akan tetapi nama kegiatannya pun turut berubah.

Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja merencanakan 6 Program, 22 Kegiatan dan 74 Sub Kegiatan, terdiri dari 1 Program Penunjang dengan 8 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan, dan 5 Program Utama dengan 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, yang kesemuanya disusun dalam rangka pencapaian tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja, yang dijabarkan dimasing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan menentukan target yang harus dicapai.

Adapun Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 8) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta

c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- 1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil

d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 2) Perluasan Kesempatan Kerja

- b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
 - 1) Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - 2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - 3) Job Fair/Bursa Kerja
 - d. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- 5. Program Hubungan Industrial**
- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - 2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
 - 3) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliansi
 - 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

a. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyuluhan Transmigrasi
- 3) Penjajagan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi
- 4) Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator outcome, Indikator grand output Kegiatan dan Indikator output sub kegiatan Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	15.107.052.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD	BB	40.974.422.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100	436.136.800	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	117.823.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.519.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	14.133.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	53.030.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	26.381.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	35.096.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 139.356.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	34.794.800	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	96,05	11.660.486.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	48	11.374.963.100	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3	154.414.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	24.965.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	12.809.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	12.585.800	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	69.889.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	10.857.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi barang milk daerah yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	7.784.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milk Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.784.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%	100	129.636.100	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1			APBD		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	129.836.100	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	100	403.614.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.083.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	47.911.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	58.134.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.205.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	45.651.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	223.204.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.424.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	487.919.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit			Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	13			APBD		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25	214.809.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	273.110.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	753.249.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	378.003.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	375.245.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	100	1.228.026.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	111.121.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	146.475.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	125	75.390.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	373.096.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	63	231.618.800	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	290.325.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	14,11	203.300.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD	92,31	223.965.000
PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen	1	203.300.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Dokumen	1	203.300.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	%	98,15	1.812.363.632	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD	1,26	3.676.739.700
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	86,47		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	1.063.529.832	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	1,85		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	300	921.921.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	141.608.332	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	Persentase LPK yang terakreditasi	Ruang	18,86	144.048.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Persentase LPK yang memiliki perizinan					APBD		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	165	144.048.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek LLS	Orang	40			APBD		
KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	8,71	258.098.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	12	258.098.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Data tingkat produktivitas total	%	68,35	146.686.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	146.686.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	%	25,59	1.111.274.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD	2500,00%	2.096.135.500
PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab.Kota.	Perjanjian	1	625.075.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	4	143.685.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	80	225.753.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	20	130.636.200	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	200	125.000.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	2700	394.863.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang	5000		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	150		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	133.170.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karr Hub)	Orang	22500	126.692.500	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	520	135.000.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	70	91.335.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40	91.335.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	29,81	1.520.451.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD	43,42	1.927.012.400
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	7,39	518.426.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	1,75		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	%	7,64		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	71,74		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	118	130.423.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah rekomendasi besaran UMK/UMSK Kabupaten Bogor kepada Bupati untuk di ajukan penetapannya oleh Gubernur Jawa Barat	Dokumen	1	128.120.600	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	259.882.400	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	10,34	1.002.024.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/ SB yang tercatat, federasi SP/ SB yang tercatat, SP/ SB di perusahaan yang tercatat, SP/ SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/ SB di perusahaan	SP/ SB	350		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	LKS	1		Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	43	273.555.800	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	43	127.633.300	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	350	256.239.700	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	344.595.900	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan	%	100	70.000.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta transmigrasi yang ditempatkan	KK	3	70.000.000	Kabupaten Bogor - Cibinong	APBD		
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	3			APBD		
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	20	70.000.000		APBD		

PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi	2	0		APBD		
Monitoring dan Evalueasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evalueasi	Lokasi	2	0		APBD		

BAB V PENUTUP

Demikian Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, maka Renja Dinas Tenaga Kerja akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Tenaga Kerja Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tenaga Kerja Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

